

**UPAYA BANK DALAM PENANGANAN KREDIT KETAHANAN
PANGAN DAN ENERGI TEBU YANG BERMASALAH**

(Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NOVITA RIZKI AMALIA

NIM. 115010101111017



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai upaya bank dalam penanganan kredit ketahanan pangan dan energi tebu yang bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun. Dari hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis penulis memperoleh jawaban dapat ditarik kesimpulan Faktor Penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia adalah karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya. Kemudian upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun untuk menangani Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah adalah menerbitkan Surat Penagihan, menerbitkan Surat Pemberitahuan, mendebet rekening Giro petani, mencabut subsidi suku bunga pinjaman, melaksanakan penyelamatan kredit 3R, melakukan lelang jaminan kredit petani tebu.

Kata kunci : Upaya Bank, Kredit Bermasalah, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu, Manajemen Risiko Perbankan, Gula Rafinasi Impor

ABSTRACT

In this paper the author discusses the efforts of bank in solving the problematic credit of food and cane energy endurance in Bank Rakyat Indonesia Branch Madiun. From the results of the research by the authors sociological juridical approach an answer can be deduced factors which causing problems in credit of food and cane energy endurance in Bank Rakyat Indonesia Branch Madiun is due to the issuance of Government Regulation No. 527/MPP/Kep/9/2004 which is set about the import of sugar which is not accompanied by strict supervision in its distribution. While the efforts made by PT . Bank Rakyat Indonesia Branch Madiun to handle the problematic credit of food and cane energy endurance are Issuing Billing, Published Notice, Debiting the Farmer's Giro, revoke the loan interest rate subsidies, doing 3R of credit rescue, auctioning the credit's collateral which are gave to sugar factory as an avalist.

Keywords: Bank's Efforts, Non Performing Loan, Problematic Credit of Food and Cane Energy Endurance, Credit of Food and Cane Energy Endurance,, Banking Risk Management, Imports of Sugar

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di Indonesia berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan, yang pada saat ini di titikberatkan pada sapek ekonomi. Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of founds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of founds*).¹ Hal ini sesuai dengan pengertian Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah²:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada msayarakat dalam bentuk kredit dab atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.³

Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁴

Lembaga perbankan sendiri dalam aktifitasnya tidak lepas dari berbagai macam jenis risiko. Untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga perbakan Bank

¹ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 2000, hal. 67

² Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³ *Ibid*, 25

⁴ Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.”⁵ Penerapan prinsip manajemen risiko dapat mengurangi risiko yang terjadi. Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu manajemen risiko bagi bank.⁶

Persebaran pabrik gula mayoritas tersebar di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan populasi PG terbanyak yaitu salah satunya di Malang dan Madiun. Dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung kelestarian swasembada pangan pemerintah bekerjasama dengan perbankan dalam berupaya memberikan bantuan modal dana murah melalui kredit perbankan yang bersifat masal antara lain dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian berupa Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE).

Di sisi lain sebagai bentuk swasembada gula, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 yang mengatur tentang Impor Gula yang dilatar belakangi oleh ketidak cukupan produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengaturannya, impor gula rafinasi dikhususkan bagi industri makanan dan minuman bukan untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam penerapannya, gula rafinasi justru mengalami kebocoran dipasar. Sehingga pada tahun 2014 telah terjadi kelebihan stok gula yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan jumlah penawaran dan permintaan atas gula yang ada. Kemudian menyebabkan gula lokal yang kalah bersaing dengan gula impor rafinasi yang cenderung lebih murah harganya. Kasus seperti ini telah terjadi di Madiun.

Salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap pemberian kredit adalah adanya “risiko” sehingga pemberian kredit disebut juga sebagai

⁵ Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

⁶ Jonker Sihombing, **Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah**, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2

penanaman dana dalam bentuk “*risk assets*”. Dan sebagaimana juga diketahui bahwa risiko atas suatu hal, adalah bersifat merugikan, dan sebagai suatu musibah atau malapetaka, risiko datangnya tidak pasti dan tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba.⁷ Maka dengan diaturnya manajemen risiko serta sanksi apabila terdapat hal yang dilanggar dalam ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tersebut Bank diharapkan mampu mencari alternatif dalam menciptakan suasana keuangan serta perekonomian nasional yang sehat dengan kondisi yang seperti sekarang ini dengan tetap mempertahankan kesehatan program KKP-E Tebu yang ada meskipun dengan keadaan debitur yang dalam hal ini petani tebu yang terancam wanprestasi dikarenakan diterbitkannya kebijakan pemerintah terkait dengan harga pokok petani tebu dan impor gula.

A. MASALAH / ISU HUKUM

1. Apa faktor penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun ?
2. Bagaimana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah ?

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.”⁸ Penulisan hendak mengkaji dan menganalisis tentang dampak diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula terhadap pelaksanaan No.

⁷ Hasanuddin Rahman, **Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 245

⁸ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> (online) diakses pada 4 Juni 2015

11/24/2009 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengenai pemberian kredit pertanian Pada Pemberian KKP-E Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis karena hendak mengkaji pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dalam pemberian KKPE - Tebu oleh Bank BRI.

Adapun data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer disini adalah data yang berupa pengetahuan dan pengalaman pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun dalam melakukan pemberian kredit pertanian kepada petani tebu.

Data sekunder disini adalah data hukum yang diperoleh berupa Arsip, Surat Edaran dalam proses pemberian KKP-E Tebu kepada petani tebu PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Dasar Pertimbangan Dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SK Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998.

Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dapat dilakukan melalui wawancara Pegawai *Account Officer* bagian Program Kredit KKPE di PT. Bank Rakyat Indonesia, studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum pada perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, PDIH, serta penelusuran melalui internet.

Kajian Pustaka yang digunakan dalam skripsi ini adalah Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Kredit, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu, Kredit Bermasalah dan Penyebabnya, dan Manajemen Risiko Perbankan

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu (KKPE Tebu) di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Kredit Ketahanan Pangan & Energi Tebu (KKPE Tebu) merupakan salah satu produk pinjaman yang mulai beroperasi di BRI pada tahun 2004 silam.

1. KKPE Tebu di BRI

Pengertian KKPE Tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / PG (Pabrik Gula). *Outstanding* untuk KKPE Tebu di cakupan Kantor Wilayah BRI Malang yang termasuk di dalamnya adalah BRI Kantor Cabang Madiun adalah sebesar Rp 73.000.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Rupiah).

2. Tahap – tahap pemberian KKPE Tebu

1. Nasabah calon debitur pada program KKPE Tebu harus memenuhi syarat dewasa.

BRI mensyaratkan pemohon Kredit Program KKPE Tebu untuk telah berumur minimal 21 (dua puluh satu) Tahun dan/atau telah menikah yang dapat dilihat dari berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon.⁹ Hal ini sesuai dengan Perihal dewasa yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.¹⁰ Calon nasabah program KKPE Tebu dapat berupa Petani secara individu, Kelompok Tani

⁹ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

¹⁰ Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

ataupun Kumpulan dari Kelompok-kelompok tani dalam hal ini yaitu Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR).

2. Tahap *BI Checking*

Yaitu pengecekan riwayat pinjaman yang pernah dilakukan oleh nasabah calon debitur di Bank Indonesia.

3. Tahap Survey

Survey dilakukan oleh 3 pihak, BRI yang diwakili oleh *Account Officer* (AO) Program, Pabrik Gula (PG), dan petani tebu yang bersangkutan. Survey ini bertujuan untuk mencocokkan data pada RDKK (Lampiran No. 2) yang diberikan PG dan Petani dengan keadaan di lapangan.

4. Tahap Analisis Kredit

Nasabah calon debitur menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman, RDKK dan Surat Rekomendasi dari dinas Perkebunan atau Pertanian. Apabila permohonan kredit diterima, maka Bank akan menerbitkan Memorandum Analisis Kredit (MAK) sebagai bentuk perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah (Lampiran No.3). MAK merupakan hasil analisa petugas bank mengenai beberapa hal yang mendukung kelayakan pemohon untuk menerima kredit. Hal-hal yang dianalisa tersebut meliputi Kebenaran identitas Pemohon, Watak Pemohon, Kemampuan produksi Pemohon, Finansial Pemohon, Modal Pemohon, Kondisi dan prospek usaha Pemohon, Jaminan Kredit Pemohon KKPE Tebu yang diberikan ke pihak PG, Kebutuhan modal kerja yang diajukan Pemohon KKPE Tebu.

Bank Indonesia mengatur perihal pelaksanaan manajemen risiko bagi setiap bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Ketentuan mengenai kewajiban untuk setiap bank menerapkan manajemen risiko ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen Risikonya dalam pelaksanaan Program Kredit KKPE Tebu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran KKPE Tebu oleh Bank BRI. Hal – hal tersebut antara lain :¹¹

(1).Melaksanakan *the five C of credit analysis*.

a. *Character*

Dengan menilai watak atau keperibadian nasabah pemohon kredit (debitur). Dapat diketahui dari Tahap Survey.

b. *Capacity*

Analisa kemampuan nasabah debitur dalam menguasai dan mengelola usahanya sehingga usaha yang dibiayai oleh bank diyakini akan berkembang dan menuai hasil yang memuaskan.

c. *Capital*

Analisa pada harta nasabah debitur secara keseluruhan baik yang berupa aktiva maupun pasiva dan baik yang berupa aktiva aktif ataupun aktiva tetap.

d. *Collateral*

Analisa terhadap Jaminan Kredit yang diberikan nasabah debitur atas pinjaman yang di ajukannya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko *Non Performing Loan*. Terdapat 2 (dua) jenis jaminan dalam hal kredit yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Sedangkan jaminan yang digunakan BRI dalam Program KKPE Tebu ini adalah jaminan perorangan yang berupa *Company (Corporate) Guarantee* yang posisinya ditempati oleh Pabrik Gula (PG).

Eksistensi penjamin secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dari pengertian pada Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan perorangan merupakan perjanjian 3 (tiga) pihak yakni antara penanggung dengan debitor dan kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*. Disamping itu dikenal pula *Company (Corporate) Guarantee* yakni jaminan perusahaan yang

¹¹ Op.Cit Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

dalam praktik berupa surat keterangan dari pimpinan perusahaan perihal keabsahan kedudukan dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan.¹²

Dari data primer yang diperoleh penulis, penulis mencoba mengambil kesimpulan dengan mengkaitkan perihal avalis dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1820 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penanggungan ialah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengkaitkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”¹³ Adanya avalis ini merupakan suatu bentuk perjanjian kredit tambahan atau *accessoir* yaitu antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula, dengan perjanjian kredit pokoknya antara pihak Petani Tebu sebagai nasabah debitur pada Program Kredit KKPE Tebu dan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak krediturnya.

e. Condition of economy

Penilaian terhadap prospek usaha yang dikembangkan petani nasabah debitur, apakah akan mendatangkan keuntungan atau tidak.

- (2).Langkah lainnya adalah dengan menyediakan Program KKPE Tebu non subsidi bagi petani tebu yang lahan garapannya lebih dari 4 Hektar atau biaya yang dibutuhkan dalam RDKK nya melebihi Rp 100 Juta.
- (3).BRI menetapkan syarat tambahan bahwa status pekerjaan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah pemohon KKPE Tebu tidak diperbolehkan berpekerjaan TNI, POLRI, PNS, dan pegawai BUMN.
- (4).Dengan melakukan pembinaan kepada nasabah debitur pasca realisasi kredit.
- (5).Melakukan perubahan pada Juknis terbarunya terkait realisasi kredit. Dimana pencairan dana kredit tertuju langsung pada petani melalui rekening SIMPEDES atas nama pribadi petani.
- (6).Penetapan Plafond kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per individu.

¹² Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 211.

¹³ Pasal 1820 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- (7). Pemeriksaan di lapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit paling kurang 3 bulan sekali.
- (8). Bagi petani tebu penggarap lahan orang lain maka ditetapkan untuk memiliki Surat Kuasa yang diberikan oleh pemilik sah lahan yang dikelola yang berisi mengenai persetujuan bahwa pemilik lahan bersedia lahan yang dimilikinya tersebut dikelola oleh petani penggarap yang bersangkutan.

Beberapa langkah yang dilakukan BRI Kantor Cabang Madiun tersebut merupakan bentuk pelaksanaan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/25/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

5. Tahap Realisasi Kredit

Dilakukan setelah MAK diterbitkan dan ditandatangani ketiga pihak terkait. Realisasi KKPE Tebu ini dilakukan dengan cara penyaluran dana cair ke rekening pribadi nasabah yang berupa SIMPEDES atas nama pribadi masing-masing petani yang total pinjamannya maksimal Rp 100 juta per individu dan maksimal area yang di biayai oleh KKPE Tebu adalah 4 hektar.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dalam melakukan kegiatan pemberian kreditnya harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati – hatian. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa :¹⁴

Pasal 10

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil olah data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis sewaktu melaksanakan penelitian, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku kreditur dalam Program Kredit KKPE Tebu telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara bank dalam melakukan analisis kredit yang dapat dilihat pada penjelasan Nomor 4 yang menjelaskan mengenai Tahap Analisa Kredit dan dapat dilihat pula dari poin – poin yang dianalisa oleh bank dalam hal memberikan kredit dalam rangka untuk mencapai tujuan bank yaitu untuk melaksanakan perkreditan yang sehat.

3. Hambatan dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Dalam pemberian KKPE Tebu oleh BRI, terdapat hambatan-hambatan yang dialami baik bersifat intern dan ekstern. Hambatan intern tersebut antara lain :¹⁵

1. Terbitnya Petunjuk Teknis baru yang lebih ketat mengenai pelaksanaan KKPE Tebu bersubsidi.
2. Dengan diterbitkannya Juknis terbaru maka petugas Program KKPE Tebu BRI diharuskan memberi sosialisasi ulang kepada nasabah maupun calon nasabah terkait dengan pembaharuan Juknis tersebut yang membutuhkan waktu, tenaga serta biaya lagi.

Sedangkan hambatan yang sifatnya ekstern antara lain :¹⁶

1. Hambatan yang berasal dari kelompok tani, dikarenakan perlakuan di tiap – tiap daerah yang berbeda mengakibatkan berbeda pula cara pengesahan kelompok tani tersebut dan tidak semua daerah mau mengakomodasi untuk membentuk kelompok tani sendiri.

¹⁵ Op.Cit Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

¹⁶ Ibid

2. Hambatan yang berasal dari pemerintah, Syarat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebagai bukti kepemilikan usaha. Padahal SPPT bukan merupakan surat bukti kepemilikan lahan.
3. Hambatan yang berasal dari petani secara individu, yaitu fakta bahwa dalam 1 (satu) areal lahan tidak hanya di gunakan untuk menanam tebu saja melainkan digunakan untuk menanam tumbuhan lainnya seperti tomat, kedelai, cabe dan lain-lain.
4. Hambatan yang muncul secara tidak diduga yang merupakan imbas dari Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Yaitu Kebijakan impor gula rafinasi yang pada tahun 2014 lalu pemerintah dianggap lalai dalam pengawasan penyaluran gula rafinasi yang dikhususkan untuk kebutuhan industri hotel, makanan dan minuman sehingga gula rafinasi tersebut malah beredar bebas dipasaran yang kemudian menyebabkan hancurnya harga gula lokal karena kalah saing dengan gula rafinasi impor tersebut di pasaran.

Hambatan – hambatan tersebutlah yang merupakan faktor *outstanding* atau jumlah total pinjaman di BRI mengalami penurunan. Yang tadinya berjumlah sekitar Rp 70 M (Tujuh Puluh Milyar Rupiah) sehingga mengalami penurunan menjadi dibawah Rp 1 M (Satu Milyar Rupiah) yaitu sekitar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).¹⁷

Pemerintah dalam upayanya membantu program KKPE Tebu menerbitkan peraturan mengenai HPP (Harga Patokan Petani) Gula yang merupakan patokan harga Gula Kristal putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani¹⁸ merupakan patokan harga minimal dari lelang gula per Kilogramnya. Dasar pelaksanaan pelaksanaan KKPE Tebu di BRI yaitu Surat Edaran Direksi Nose S.1-DIR/ADK/01/2008 tentang KKPE Pengembangan Tebu beserta Perubahannya dan berbagai Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku secara intern yang disesuaikan dengan berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia termasuk salah

¹⁷ ibid

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014

satunya Undang – Undang Perbankan yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁹

B. Faktor – Faktor Penyebab KKPE Tebu Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

1. Pengaruh Kebijakan Impor Gula Rafinasi oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 18/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada tahun 2014 lalu telah menyebabkan terjadinya fenomena merembesnya Gula Rafinasi Impor di pasar umum sedangkan gula rafinasi tersebut adalah gula yang sebenarnya khusus diperuntukan bagi industri makanan dan minuman. Sehingga menimbulkan beberapa hambatan antara lain :

1. Produk gula dalam negeri kalah saing dan mengalami penurunan dalam penjualannya.
2. Penghasilan yang diperoleh PG dari proses lelang gula menurun. Sehingga PG terhambat dalam membagi hasil lelang.
3. PG mengalami keterbatasan dalam melakukan pembayaran pengembalian KKPE Tebu dengan begitu timbul kemungkinan Pinjaman KKPE Tebu tersebut menjadi kredit yang bermasalah dan akan berdampak pada peningkatan persentase *Non Performing Loan* (NPL) di BRI KC Madiun.

Di BRI KC Madiun dalam hal pembagian golongan kredit bermasalah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kulaitas Aktiva Bank Umum yaitu Lancar, Dlam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,

¹⁹ Ibid

Diragukan, dan Macet.²⁰ Dengan begitu kebijakan impor gula yang ditetapkan oleh pemerintah membawa pengaruh buruk bagi pihak Bank sebagai kreditur apabila tidak dibarengi dengan pengawasan penyaluran secara ketat.²¹

C. Upaya Penanganan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun

Yang dapat dikatakan sebagai KKPE Tebu yang bermasalah adalah KKPE Tebu yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan, berikut upaya – upaya BRI KC Madiun untuk menanggulangnya :²²

1. Menerbitkan Surat Penagihan
2. Menerbitkan Surat Pemberitahuan
3. Melakukan pendebetan rekening Giro petani yang bersangkutan.
4. Mencabut subsidi suku bunga pinjaman yang sebelumnya 8,25% menjadi 13%.
5. Melaksanakan 3R yaitu *restructuring, rescheduling dan reconditioning*.
6. Melakukan lelang atas jaminan kredit petani tebu. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tebu yang bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia adalah antara lain karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 yang

²⁰ Pasal 12 ayat (3) PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kulaitas Aktiva Bank Umum

²¹ Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

²² Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015 Pukul 08.30 WIB

mengatur tentang Impor Gula yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya

2. Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun untuk menangani KKPE Tebu bermasalah adalah menerbitkan Surat Penagihan ke PG dan Petani terkait, menerbitkan Surat Pemberitahuan ke Kelompok Usaha Tani, mendebet rekening Giro petani, memberikan sanksi dengan mencabut subsidi suku bunga pinjaman, melaksanakan penyelamatan kredit 3R, Melakukan lelang atau penjualan atas jaminan kredit petani tebu yang merupakan nasabah debitur Program KKPE Tebu kepada Pabrik Gula (PG) selaku avalis.

SARAN

1. Bagi perbankan, dalam pelaksanaan pencabutan suku bunga kredit subsidi menjadi komersial, menurut penulis hal tersebut perlu direvisi. Seharusnya bank tidak melakukan pencabutan suku bunga kredit, karena dengan naiknya suku bunga kredit tersebut akan semakin menyulitkan petani dalam membayar kreditnya.
2. Bagi Pemerintah, dalam penlaksanaan Peraturan Pemerintah No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula menurut penulis Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih ketat dalam pengawasannya atas produk-produk yang diimpor ke Indonesia termasuk di dalamnya adalah gula.
3. Bagi Bank Indonesia, sebaiknya Bank Indonesia membuat suatu peraturan atau kebijakan yang baik berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau berupa Surat Edaran (SE) yang mengatur mengenai perlindungan Petani Tebu sebagai debitur kredit Program KKPE Tebu dalam hal terjadinya suatu *overmacht* atau keadaan yang tidak diduga-duga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Jonker Sihombing, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, PT Alumni, Bandung.

Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kulaitas Aktiva Bank Umum.

PBI No. 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M
DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula
Kristal
Putih Tahun 2014

INTERNET

Admin, 2013, *Pembahasan Penelitian Empiris (online)*
<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> (online) diakses pada 4 Juni 2015

LAIN-LAIN

Hasil Wawancara dengan Petugas *Account Officer* bagian Kredit Program pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun, Bapak Baddaruzzaman Anshari. 11 Mei 2015